

BAB V

ANALISIS KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MODERATISME DI PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM JEMBER

Telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya bahwa pesantren merupakan sistem perilaku. Prosedur-prosedurnya lahir dari aktivitas atau interaksi masyarakat muslim Jawa dengan kiai dan kitab kuning. Sebagai lembaga, pesantren adalah hasil interaksi suatu masyarakat dengan seorang tokoh yang dianggap mumpuni dalam bidang agama. Elemen-elemennya terdiri atas kiai, rumah kiai, masjid, santri, dan pengajian kitab kuning, meskipun kali pertama muncul, pesantren tidak memiliki elemen selengkap bentuknya yang dikenal saat ini.

Sejarah panjang pesantren di Indonesia adalah sejarah panjang pendidikan Islam itu sendiri. Sistem pengajaran dan kurikulumnya yang kurang lebih tidak banyak mengalami perubahan merupakan bukti nyata kematangan pemahaman para kiai dahulu dalam merumuskannya. Masuknya pendidikan formal ke dalam pesantren tidak lantas bisa dijadikan gugatan bahwa pesantren telah berubah dari akarnya. Sebab, adopsi ini hanya merupakan salah satu wujud fleksibilitas pesantren dalam menghadapi tren dan kecenderungan zaman.

Ilustrasi ini juga berlaku untuk PP. Nurul Islam Jember. Seperti pesantren-pesantren lain yang telah mengadopsi sistem pendidikan formal, pesantren yang didirikan oleh KH. Muhyiddin Abdussomad ini menggunakan dua model sistem

pendidikan, sistem madrasah dan sistem pendidikan formal. Namun yang membedakan dari pesantren lain, berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di Bab IV, ialah bahwa basis yang mendasari seluruh proses pengajaran dan pendidikan Islam di pesantren ini adalah moderatisme.

Tentu, pemilihan basis ini tidak terlepas dari kebijakan pangasuh yang boleh dikatakan dipengaruhi oleh kondisi sosio-politik dan sosio-kultural yang tengah menggejala saat itu. Kondisi-kondisi ini telah dipaparkan secara luas pada Bab IV berdasarkan penuturan pangasuh PP. Nurul Islam Jember. Karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan fenomenologi, yakni suatu pendekatan yang berusaha memahami struktur pengalaman sebagaimana penuturan pihak yang mengalami dan sebagaimana adanya, tanpa pretensi terhadap teori tertentu, pengurangan, atau asumsi dari disiplin lainnya, maka pada Bab V ini peneliti akan mengetengahkan analisis dan uji relevansi terhadap data-data tersebut, dan akan memetakannya dalam empat sub: a). Analisis konstruksi kurikulum pendidikan Islam berbasis moderatisme dalam bingkai ASWAJA dan gender di PP. Nurul Islam Jember; b). Analisis penerapannya; c). Analisis implikasi penerapannya; d). Analisis problematika penerapannya. Pembagian ini dilakukan untuk mendapatkan validitas data sesuai ketentuan yang telah dipaparkan di Bab IV, yakni mengoreksi ulang hasil penelitian, dengan mengonfirmasikan kembali kepada pihak-pihak terkait untuk validasi data.

A. Analisis Konstruksi Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderatisme di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember: ASWAJA dan Gender

Pada Bab II telah diuraikan beberapa hasil penelitian tentang kurikulum ‘khas’ pesantren serta beberapa contohnya. Ada sejumlah pesantren tertentu yang keluar dari *mainstream* pesantren pada umumnya. Kurikulum akidahnya sama sekali berbeda dengan pesantren-pesantren lain, sebagaimana telah diuraikan. Ada pula pesantren konservatif, yaitu pesantren yang tetap berpegang teguh pada tradisinya, baik dalam materi, metode, maupun penerapannya.

PP. Nurul Islam Jember masih termasuk dalam *maintstream* pesantren pada umumnya dari aspek materi pelajarannya yang terdiri atas Tauhid, Fikih, Akhlaq, Taşawuf, Hadis, *Muşalah al-Hadīth*, Bahasa Arab, Naḥwu, Şaraf, Balāghah, Mantiq, hingga Uşul al-Fiqh dan Qawā'id al-Fiqh. Khusus Tauhid, Fikih, dan Taşawuf, yang berada dalam koridor paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Aswaja) yang lebih mengedepankan paham moderat. Selebihnya, PP. Nurul Islam ini mengikuti pola kurikulum pesantren pada umumnya, sebagaimana telah dipaparkan pada Bab II.

Sedangkan kurikulum pendidikan formal, pesantren ini mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemendiknas dan Kemenag. Khusus pendidikan Agama Islam, bekerja sama dengan Rahima. Dalam hemat peneliti, kerja sama yang terjalin telah banyak memberikan sumbangsih nyata. Antara lain berupa buku pegangan siswa, buku Pendidikan Agama Islam untuk SMA Nuris/SMK Nuris kelas X, XI, dan XII, yang beberapa poinnya

telah dikutip pada bab sebelumnya. Muatannya berbeda dengan buku paket umum, meski tetap mengacu kepada KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang standar kompetensinya telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hemat peneliti, buku pegangan hasil kerja sama dengan Rahima merupakan upaya sosialisasi kesadaran gender. Ini penting karena banyak sekali aksi kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh rendahnya pemahaman tentang posisi hakiki lelaki dan perempuan dalam Islam.

Disamping gender, konstruksi kurikulum pendidikan Islam berbasis moderatisme di PP. Nurul Islam Jember, juga diisi oleh materi ASWAJA. Dalam hemat peneliti, figur KH. Muhyiddin Abdusshomad yang telah banyak menulis buku tentang ASWAJA ikut berperan aktif dalam hal ini. Gagasannya tentang toleransi, sikap adil, sikap seimbang, persamaan hak asasi manusia, cinta tanah air (nasionalisme), pengenalan aliran Shī'ah, Wahabi, dan aliran-aliran lainnya, mewarnai konstruksi kurikulum pendidikan Islam yang tidak gampang menuduh dan menyesatkan. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari kerangka berpikir ASWAJA yang dimiliki oleh pengasuh PP. Nurul Islam ini.

Jika melihat pada kitab yang diajarkan, maka kitab kuning yang dijadikan pegangan—tentu disesuaikan dengan jejang kelas, entah itu *Ulā* ataukah *Wustā*—relatif sama dengan pesantren yang lain. Tauhid (*'Aqīdat al-'Awāmm*, *Risālat al-Mu'āwanah*, *Bidāyat al-Hidāyah*, dan *al-Ḥikam*), Fikih (*Sullam Safīnah*, *Taqrīb*, *Fath al-Mu'īn*, dan *Kifāyat al-Akhyār*), Akhlaq-Tasawuf (*Ta'fīm al-Muta'allim*, *Taisīr al-Khallāq*, *Dzurrat al-Nāsihīn*), al-Qur'an (*Tafsīr al-Jalālain* dan *Tafsīr Yāsīn Hamāmīy*), Hadis (*Ṣaḥīḥ al-*

Bukhārīy dan *Muslim*, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* dan *Bulūgh al-Marām*), dan Nahwu (*Jurūmiyyah*, *al-‘Imrīṭīy*, dan *Alfiyah*).²⁹¹ Tetapi yang membedakan ialah cara interpretasinya. Paradigma pemahaman terhadap kitab-kitab ini—utamanya yang menyangkut Tauḥīd dan Fikih—didasarkan pada cara pandang yang moderat.

Perspektif seseorang dalam memahami suatu teks—apalagi teks al-Qur’an—sangat mempengaruhi hasil pemahaman yang diperolehnya. Lahirnya radikalisme dan fundamentalisme antara lain, diakibatkan oleh cara pandang yang cenderung tekstualis. Artinya, apa yang tidak tercantum dalam teks, berarti salah. Paradigma moderatisme sebagai basis seluruh proses pembelajaran yang diterapkan di pesantren ini pada akhirnya membentuk apa yang dikenal oleh wacana kurikulum modern sebagai kurikulum tersembunyi, kurikulum yang tidak tertulis dalam kurikulum pesantren.

Sebagaimana telah diuraikan, moderatisme merupakan sebuah metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku, untuk menemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat. Untuk itu, konstruksi kurikulum berbasis moderatisme di PP. Nurul Islam ini tampil dalam tiga fungsi:

1. sebagai metode berpikir. Pendidikan model ini diberlakukan dalam cara memahami teks-teks kitab kuning, yang dalam hal ini banyak dilakukan oleh pengasuh, lalu diikuti oleh tenaga pendidik lainnya. Para santri pun

²⁹¹Dokumentasi PP. Nurul Islam Jember, 4 Desember 2013.

secara khusus mendapatkan pengalaman langsung bagaimana pengasuh dan para tenaga pendidik lainnya dalam menyampaikan materi pelajaran yang bersumber dari kitab kuning;

2. sebagai cara berinteraksi. Interaksi antar sesama aliran dan agama, interaksi dengan aliran dan agama lain, seperti kerja sama yang dibangun oleh PP. Nurul Islam Jember dengan lembaga-lembaga Kristen atau kelompok keagamaan, seperti FPI dan JIL;
3. sebagai cara bersikap. Fungsi pendidikan islam berbasis moderatisme dalam hal ini lebih menekankan pada cara seseorang bersikap kepada orang lain, seperti toleran, seimbang, proporsional, dan bijak, bukan hanya dalam melihat orang lain, melainkan juga dalam memposisikan orang lain.

Ketiga fungsi tersebut terlihat dalam seluruh proses pembelajaran di PP. Nurul Islam Jember, yang dibuktikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada moderatisme, baik dalam beribadah maupun dalam **bermu'amalah** dengan orang atau pihak lain. Bentuk riil dari pemanfaatan ketiga fungsi tersebut ialah ASWAJA dan gender. Khusus gender, seperti telah disebut, pesantren ini bekerja sama dengan Rahima dan PUAN Amal Hayati. Itulah sebabnya, pembelajaran yang diselenggarakan di PP. Nurul Islam ini adalah pembelajaran integratif yang melibatkan semua elemen pesantren.

B. Analisis Penerapan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderatisme di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember

Latar belakang penerapan kurikulum pendidikan Islam berbasis moderatisme di PP. Nurul Islam Jember, sebagaimana telah dipaparkan dalam bab IV berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh pesantren ini, merupakan responsif pesantren terhadap persoalan-persoalan aksi radikalisme yang terjadi waktu itu. Dalam hemat peneliti, penerapan ini merupakan wujud daya adaptif pesantren sebagai lembaga yang merasa bertanggungjawab atas aksi anarkis tersebut. Artinya, sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren merasa harus bisa mengatasi masalah radikalisme yang akhir-akhir ini begitu marak.

Maka dari itu, sangatlah tepat jika pesantren ini ‘menerjemahkan’ moderatisme sebagai basis pendidikan Islam ke dalam tujuh bentuk kegiatan-kegiatan praktis: 1). pengajian kitab kuning; 2). seminar; 3). diskusi; 4). pelatihan; 5). tanya jawab; 6). *baḥth al-masā'il*; dan 7). kerja sama dengan berbagai macam aliran, paham, dan agama. Ketujuh kegiatan ini merupakan agenda rutin yang telah direncanakan oleh PP. Nurul Islam Jember, sebagai langkah pembiasaan dan pembelajaran aktif spirit moderatisme. Kondisi sosio-politik dan sosio-kultural yang tengah terjadi merupakan faktor yang mendasari kebijakan pengasuh pesantren ini ketika memutuskan untuk membasiskan setiap proses pengajaran dan pendidikan Islam di pesantren yang diasuhnya pada moderatisme.

Hanya saja, metode penerapan kurikulum pendidikan Islam berbasis moderatisme di PP. Nurul Islam Jember, masih belum menemukan struktur bentuk yang jelas. Sebab, dari wawancara yang diperoleh, metode penerapan yang digunakan hanyalah pembelajaran integratif, yakni pembelajaran yang melibatkan semua elemen pesantren yang terdiri dari kiai, ustaz-ustazah, pengurus, dan santri. Jika pembelajaran integratif ini *breakdown* ke dalam langkah-langkah praktis yang lebih sistematis maka sangat memungkinkan untuk lebih mudah dibaca, dirumuskan, dan diterapkan, sebagai contoh atau teladan bagi pesantren-pesantren lain yang belum menerapkan moderatisme sebagai basis pendidikan Islam yang diselenggarakannya.

Namun jika ditinjau dari aspek relevansinya, secara garis besar penerapan kurikulum pendidikan Islam berbasis moderatisme di PP. Nurul Islam Jember memiliki tingkat relevansi yang cukup tinggi. Sebab, mau tidak mau penerapan moderatisme sebagai basis seluruh proses pendidikan Islam tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan gejolak politik yang membuat pengasuh berinisiatif untuk memberlakukannya. Maka sikap dan kebijakan pengasuh memainkan peran yang cukup signifikan dalam penetapan basis sistem pendidikan yang akan diterapkan di pesantren yang dirintisnya.

Pertimbangan tersebut bergantung pada penemuan model pendidikan yang bukan hanya dibutuhkan masyarakat pada masa kini dan masa mendatang, melainkan juga mampu mempersiapkan generasi yang tahan dan imun terhadap godaan aksi-aksi radikalisme dalam menyelesaikan suatu konflik. Memang, sebagaimana tercatat dalam sejarah berdirinya, tujuan

didirikannya pesantren ini ialah meluaskan jangkauan dakwah Islam. Akan tetapi, tragedi Tanjung Priok tahun 1984 dan pembakaran gereja besar-besaran di Situbondo tahun 1996 dinilai oleh pengasuh sebagai aksi radikalisme terbesar waktu itu yang mengantarkannya memilih moderatisme sebagai basis seluruh proses pendidikan Islam di PP. Nurul Islam ini.

Respon yang diberikan pengasuh terhadap aksi-aksi radikalisme yang terjadi waktu itu merupakan bentuk penyesuaian sekaligus langkah antisipatif. Oleh karenanya, relevansi basis pendidikan Islam yang diterapkan dengan situasi sosial dan politik yang terjadi adalah konsekuensi logis dari bentuk penyesuaian dari langkah antisipatif tersebut. Relevansi ini dapat dilihat dari tiga dimensi: *pertama*, dimensi historis; *kedua*, dimensi geografis; dan *ketiga*, dimensi tuntutan zaman.

1. Dari Dimensi Historis

Cita-cita didirikannya PP. Nurul Islam Jember di kelurahan Antirogo bukan hanya datang dari KH. Muhyiddin Abdusshomad, melainkan juga datang dari masyarakat sekitar. Tak ubahnya latar belakang berdirinya pesantren lain di Indonesia pun sering kali merupakan inisiatif bersama masyarakat sekitar. Ini membuktikan bahwa pesantren betul-betul dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kecenderungan dan tren masyarakat juga berubah.

Masyarakat juga membutuhkan pendidikan formal. Alasannya cukup pragmatis: kalau punya ijazah formal, mencari kerja tentu lebih mudah. Tidak ada yang salah dengan alasan tersebut. Tetapi yang cukup

membuat peneliti heran adalah mengapa pesantren ini mendirikan cabang SMP terlebih dahulu, bukan MTs; lalu meneruskannya dengan mendirikan SMA, bukan MA. Padahal, jika melihat latar belakang pendidikan KH. Muhyiddin Abdusshomad, SMP dan SMA jelas tidak masuk dalam hitungan.

Sebagaimana hasil studi yang dilakukan oleh Ma'shum, KH. Muhyiddin adalah alumnus pesantren tradisional, Raudhatul Ulum Sumber Wringin Jember, di bawah asuhan Kiai Umar dan Kiai Khotib Umar, tahun 1966-1973; kemudian Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, di bawah asuhan Kiai Kholil Nawawie tahun 1973-1980, tentu ia memiliki tradisi keilmuan yang begitu religius dan islami. Mempertimbangkan riwayat pendidikannya, seharusnya ketika memutuskan mendirikan lembaga pendidikan formal, MTs atau MA-lah yang dipilihnya. Namun lembaga pendidikan formal yang diadopsi pertama kali justru SMP sebagai cabang dari SMP al-Furqan.

Setelah dikonfirmasi, dalam pandangan pendiri dan pengasuh PP. Nurul Islam ini, hal tersebut tidak lain dikarenakan kurang siapnya masyarakat sekitar. Masyarakat di kelurahan Antirogo masih memiliki perspektif yang keliru terhadap MTs dan MA. Dua lembaga pendidikan Islam tersebut dianggap tidak mengajarkan materi pengetahuan umum, bahkan konon pernah terjadi, salah seorang lulusan MA ditolak ketika melamar pekerjaan dikarenakan ijazah yang dimilikinya bukan dari SMA.

Jadi, jika ditelisik lebih jauh, SMP Nuris tidak akan pernah terbentuk jika Sang Kiai menggunakan egoisme keilmuannya: bahwa pesantren harus mengadopsi pendidikan formal yang islami. Hal ini tidak lain karena pengasuh memiliki pandangan ke depan. Boleh saja sekolahnya di SMP, tetapi santri tetap mengikuti kegiatan pengajian yang diselenggarakan di pesantren. Dalam hemat peneliti, kebijakan pengasuh yang telah mengambil jalan tengah dalam merespon kecenderungan masyarakat merupakan benih-benih sikap toleran terhadap pola pikir masyarakat sekitarnya. Pada gilirannya, sikap toleran itulah yang menjadi embrio lahirnya moderatisme sebagai basis seluruh proses pengajaran dan pendidikan Islam yang diterapkan di pesantren ini, di samping faktor sosial dan politik, sebagaimana telah dijelaskan.

Di samping itu, pemilihan SMP sebagai lembaga pendidikan formal pertama yang dibentuk di pesantren merupakan bagian dari strategi awal untuk menarik minat masyarakat. Sebab, dalam hemat peneliti, tidak mudah mendirikan pesantren di tengah-tengah lingkungan perkotaan, membutuhkan ketelatenan, keuletan, kesabaran, dan pertimbangan yang moderat, agar pesantren dapat tetap bertahan di tengah gempuran globalisasi dan modernisasi.

Ketika pola pikir masyarakat lambat laun berubah, barulah pesantren ini melangkah pada tahap pengembangan berikutnya, yakni mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs), bahkan bukan sembarang MTs, melainkan MTs Unggulan. Menyusul kemudian, pesantren ini mendirikan

Madrasah Aliyah (MA), pun MA Unggulan. Dua madrasah unggulan ini memang secara khusus dipersiapkan pihak pesantren untuk mengkader generasi ASWAJA yang bukan hanya mampu membaca dan memahami teks kitab-kitab kuning, melainkan juga mampu “berdialog” dengan perkembangan teknologi, dan lebih mengedepankan sikap moderat dalam bertindak dan memutuskan suatu perkara.

Pesantren ini juga tidak mengharuskan santrinya untuk bersekolah di lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Yayasan NURIS Jember. Tidak sedikit santri yang bersekolah di luar pesantren. Kenyataan ini tidak membuat pengasuh dan para pengurus khawatir bahwa pesantren hanya akan menjadi tempat tidur atau tempat kos. Bahkan sampai saat ini, tidak sedikit santri yang bersekolah atau kuliah di luar, seperti sekolah farmasi dan UNEJ.

Dalam hemat peneliti, semua ini tak lain merupakan efek dari bangunan moderatisme pengasuh dalam merespon perkembangan zaman. Tanpa bangunan sikap moderat pengasuh, sulit—untuk tidak mengatakan mustahil—pesantren ini berkembang pesat seperti saat ini. Sejarah panjang berdirinya PP. Nurul Islam ini, lambat laun mengiringi konstruksi moderatisme sebagai basis seluruh proses pengajaran dan pendidikan Islam di pesantren ini, yang relevan dan peka terhadap geliat zaman.

2. Dari Dimensi Geografis

Letak PP. Nurul Islam Jember, seperti telah dijelaskan, berada di kelurahan Antirogo. Pola kehidupan masyarakatnya semakin lama

semakin mengarah pada kehidupan perkotaan. Iklan-iklan besar di pinggir-pinggir jalan sekitar pesantren adalah salah satu tanda peralihan nuansa pedesaan menuju perkotaan. Cara berpakaian warganya mirip dengan bintang-bintang film di televisi. Mayoritas penduduk kelurahan Antirogo beretnik Madura. Namun, sejak kos-kosan para pelajar dan mahasiswa banyak bermunculan, beragam etnik pun hidup berdampingan di kelurahan ini, baik yang asli suku Jawa, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Keberadaan beberapa lembaga pendidikan, seperti sekolah farmasi, SMK, dan lain-lain, juga mengantarkan penduduk kelurahan Antirogo pada gaya hidup masyarakat urban.

Setiap hari para santri PP. Nurul Islam ini bersinggungan dengan lalu-lalang pejalan kaki, pengendara mobil, maupun sepeda motor, sendirian atau boncengan, laki-laki dan perempuan, yang melewati jalan raya yang membelah jarak antara asrama santri dan masjid serta lembaga pendidikan formalnya. Beragam orang, beragam model pakaian, beragam etnik, bahkan beragam agama, akrab dengan kehidupan santri di pesantren ini. Maka jika kemudian ditanyakan, basis sistem apakah yang paling cocok untuk mendasari seluruh proses pengajaran dan pendidikan Islam di pesantren ini, dengan kondisi sosial seperti telah dijelaskan, tentu jawabannya ialah basis sistem yang mampu meletakkan keragaman dan perbedaan sesuai pada tempat dan porsinya, yakni tiada lain basis moderatisme.

3. Dari Dimensi Tuntutan Zaman

Dimensi historis dan dimensi geografis yang telah dipaparkan memberikan gambaran bahwa kondisi sosial senantiasa dinamis. Perbedaan antara satu individu dan individu lainnya, atau kelompok satu dan kelompok yang lain, baik ras, bahasa, aliran, maupun agamanya adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari maupun dipungkiri. Pada hakikatnya perbedaan bukanlah masalah; yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan, dalam hal apapun, diartikan sebagai kesalahan dan harus disamaratakan.

Gerak zaman semakin lama semakin menunjukkan bahwa perbedaan masing-masing orang, menemukan momen ekspresinya. Setiap orang di bumi Nusantara ini—nyaris sama dengan pola pikir Barat—akhir-akhir ini ‘dibolehkan’ menampilkan ‘siapa dirinya’. Pesan ini sudah disosialisasikan secara transparan melalui iklan-iklan di media massa. Jika generasi muda tidak dibekali sejak dini untuk memaklumi dan menghormati perbedaan, bukan tidak mungkin gerakan sporadis-radikal akan lahir dari mereka, seperti komunitas-komunitas anak muda ‘Punkers’ yang hampir bisa dijumpai di setiap kota di Indonesia.

Kondisi sosial dan geliat zaman tersebut menuntut siapapun yang terlibat di dalamnya untuk dapat ‘hidup’ berdampingan dengan aneka macam warna kulit, aliran, paham, dan agama, demi kerukunan dan kedamaian yang bukan hanya antar umat manusia tapi juga antar sesama makhluk Tuhan. Jika demikian halnya, dalam konteks ini maka

moderatisme adalah keniscayaan yang memang harus dihidupi, bukan hanya di PP. Nurul Islam Jember, melainkan di seluruh belahan dunia yang dihuni oleh masyarakat yang selalu mendambakan kerukunan dan kedamaian. Relevansi moderatisme bukan hanya terletak di dunia pendidikan Islam semata, melainkan juga dalam kehidupan itu sendiri.

Ketiga dimensi ini memperlihatkan bahwa relevansi penerapan moderatisme sebagai basis pendidikan Islam cukup tinggi. Apalagi, jika melihat intensitas konflik—dengan aksi-aksi radikalisme dan anarkisme sebagai menu utamanya—yang terjadi akhir-akhir ini, moderatisme bukan hanya suatu solusi tetapi merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar.

C. Analisis Implikasi Penerapan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderatisme di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember

Seperti telah disebutkan di atas, penerapan kurikulum pendidikan Islam berbasis moderatisme di PP. Nurul Islam Jember diaplikasikan dalam tujuh bentuk kegiatan rutin: 1). pengajian kitab kuning; 2). seminar; 3). diskusi; 4). pelatihan; 5). tanya jawab; 6). *baḥṡ al-masā'il*; dan 7). kerja sama dengan berbagai macam aliran, paham, dan agama. Ketujuh kegiatan ini merangsang *al-jānib al-ruḥīy* (aspek afektif), *al-jānib al-jismīy* (aspek psikomotorik), dan *al-jānib al-'aqlīy* (aspek kognitif) para santri yang terlibat secara simultan.

Ketika aspek tersebut mendapatkan porsi perhatian pendidikan Islam yang sama, maka dualisme keilmuan -ilmu dunia dan ilmu akhirat-tidak akan

lagi melekat dalam pertimbangan intelektual para santri. Sebab, melalui ketujuh kegiatan tersebut, dalam kesadaran mereka, akan tertanam bahwa semua ilmu berasal dari Allah Swt. dan akan bermuara kepada Allah Swt.. Kesadaran ini tidak dapat terbentuk kecuali yang bersangkutan telah memiliki pola pikir moderat.

Artinya, santri punya kemampuan dan kesanggupan untuk menempatkan ilmu umum dan ilmu agama pada tempat dan porsi masing-masing. Kedua kategori tersebut tidak dipisahkan, apalagi dilebihkan antara satu dari lainnya. Keduanya memiliki tugas masing-masing, antara yang satu tidak dapat menggantikan yang lain. Dari sinilah, moderatisme sebagai cara berpikir telah berhasil melebur ke dalam sikap para santri, sedikit atau banyak, sebagai salah satu implikasi nyata dari penerapan pendidikan Islam berbasis moderatisme di PP. Nurul Islam Jember.

Pengikisan dualisme keilmuan ini, dalam hemat peneliti, perlu dilakukan, sebab salah satu factor kejayaan Islam pada masa keemasan antara lain dikarenakan para ulamanya mampu bersikap moderat dalam memandang ilmu pengetahuan; tidak membedakan secara diskriminatif ilmu duniawi dan ukhrawi. Mereka hanya membedakan secara tipologik bahwa ilmu pengetahuan ada yang bersifat duniawi dan juga bersifat ukhrawi, sebab masing-masing mempunyai porsi dan posisi tersendiri.

Untuk memberikan gambaran tentang implikasi ketujuh kegiatan tersebut terhadap sikap para santri maka peneliti secara garis besar mengelompokkan ketujuh kegiatan tersebut secara fungsional berdasarkan

sasaran pendidikan Islam yang terdiri atas aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif.

1. *al-Jānib al-‘Aqlīy* (Aspek Kognitif)

- a. **Pengajian kitab kuning** merupakan interpretasi terhadap karya-karya klasik yang -dalam satu dan lain sudut pandang- dapat dikatakan ketinggalan zaman, cenderung kaku, kolot, dan monoton. Tetapi paradigma yang moderat dalam kontekstualisasi kandungan kitab tersebut akan memberikan konklusi yang bijak. Sebab, paradigma yang kaku akan melahirkan pemahaman yang kaku pula, sekalipun kandungan kitab-kitab yang dibaca bermuatan toleransi. Lahirnya radikalisme dan fundamentalisme keagamaan, antara lain, dimotori oleh paradigma pemahaman yang kaku, tekstualis, dan eksklusif.

Menurut hemat peneliti, cara interpretasi yang proporsional dan kontekstual ketika mengajarkan kitab kuning di pesantren ini akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar kepada santri dalam menghindari diri dari tindakan anarkis atas dasar agama, daripada memahami kitab kuning secara tekstual. Pengajaran kitab kuning secara tekstual hanya akan mengakibatkan eksklusifitas pemikiran yang dangkal dan tidak toleran. Jika metode pengajaran kitab kuning ini diterapkan di seluruh pesantren, maka sangat rasional bila dikatakan bahwa sikap radikalisme dalam penyelesaian persoalan antar golongan dapat dihindari.

b. Seminar yang diadakan di PP. Nurul Islam Jember sangat bermanfaat sebagai media komunikasi untuk saling bertukar gagasan, pengetahuan dan pengalaman. Seminar merupakan suatu forum bagi para pakar untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan rencana, dan metodologi penelitian. Hanya saja, seminar “Menuju Pendidikan yang Membebaskan dan Berkeadilan Gender” tahun 2002 di PP. Nurul Islam Jember, yang terbatas untuk kalangan guru dan pengasuh Pondok Pesantren Se-Jember masih belum maksimal, karena tidak melibatkan para santri secara langsung dan cakupan pesertanya sangat terbatas. Disamping juga, sejauh pengamatan peneliti, belum ada rumusan rencana tindak lanjut yang jelas dari kegiatan tersebut bila melihat pada dokumentasi arsip kegiatan.

2. *al-Jānib al-Jismīy* (Aspek Psikomotorik)

a. **Diskusi.** Jika di lembaga pendidikan lain diskusi adalah forum resmi yang dibuka dan ditutup dengan cara yang formal, maka diskusi di kalangan santri PP. Nurul Islam Jember adalah hal biasa yang bisa dilakukan di mana saja sekalipun dengan dua orang anggota, *small club* (kelompok kecil). Diskusi kecil semacam ini akan menambah wawasan keilmuan para santri, di samping juga akan membiasakan para santri untuk tidak malu mengemukakan gagasannya tanpa memaksakan pendapatnya, lebih-lebih sampai pada tahap anarkisme. Kegiatan ini pada akhirnya akan membentuk pribadi santri pada kecakapan, keterbukaan dan kedewasaan dalam berpikir dan bersikap.

- b. **Pelatihan** di PP. Nurul Islam Jember diterjemahkan sebagai pembekalan kepada santri. Sebab, di zaman yang serba multi ini, santri tidak hanya dituntut untuk pandai memahami kitab, tetapi juga diharuskan terampil dalam berinteraksi dengan masyarakat. Pelatihan yang diselenggarakan di pesantren ini masih bersifat kognitif yang lebih menekankan pada latihan kecakapan berdialog, baik dalam seminar ataupun diskusi, formal atau tidak formal. Tak ubahnya program **tanya-jawab**; yang bersentuhan langsung dengan santri yang tengah memiliki suatu masalah. Inilah yang memperkaya wawasan santri hingga ia memiliki kesadaran tentang ragam pendapat, persepsi, dan ideologi masing-masing orang.
- c. *Baḥth al-Masā'il* merupakan kegiatan intelektual sekaligus kultural yang harus dilestarikan. Dikatakan kegiatan intelektual karena melibatkan proses berpikir mendalam tentang suatu masalah. Dan dikatakan kegiatan kultural, karena kegiatan ini telah dilakukan dan diwariskan oleh ulama-ulama pesantren sejak dahulu.

Salah satu factor ketidakmampuan seseorang dalam menerima pendapat orang lain merupakan efek ketidakikutsertaannya dalam forum-forum semacam ini. Melalui kegiatan ini PP. Nurul Islam Jember, secara tidak langsung telah memberikan pengalaman langsung, bukan hanya wawasan kemoderatan dalam tataran teoretik.

3. *al-Jānib al-Rūhīy* (Aspek Afektif)

Kerja sama dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah, dan dengan lembaga pesantren yang sealiran adalah hal biasa dan lumrah. Akan tetapi kerja sama yang dibentuk oleh PP. Nurul Islam Jember adalah kerja sama dengan pihak-pihak yang berlainan aliran, paham, bahkan agama. Hal ini merupakan hal yang luar biasa sebagai wujud nyata pemahaman moderat terhadap teks-teks klasik—termasuk al-Qur'an dan Hadis—yang dipelopori oleh KH. Muhyiddin Abdusshomad sendiri. Tanpa kebijakan pengasuh yang didasarkan pada metodologi berfikir moderat, mustahil kerja sama tersebut akan terbentuk. Tak ubahnya sebilah pisau, setajam apapun goresannya tetap akan berfungsi sebagaimana mestinya jika berada di tangan seorang koki; sebaliknya setumpul apapun benda tersebut akan tetap membahayakan orang lain jika dipegang oleh perampok.

Ketujuh kegiatan di atas bisa dikembangkan, mengingat capaian implikasi penerapannya yang cukup kompleks. Menanamkan sikap *tasāmuḥ* (toleransi), *tawāzun* (seimbangan), *i'tidāl* (sikap adil), persamaan hak asasi manusia, dan cinta tanah air (nasionalisme), tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dalam hemat peneliti, ketujuh kegiatan yang telah diprogramkan secara rutin di PP. Nurul Islam Jember perlu terus diamati, dikaji, dan dirumuskan ulang, supaya tetap relevan dengan tuntutan zaman.

Uraian ini memberikan gambaran kepada peneliti bahwa basis moderatisme sesungguhnya merupakan cara pikir, cara pandang, paham, dan sikap. Apalagi, jika pengajaran dan pendidikan direalisasikan melalui pembelajaran integratif yang melibatkan semua elemen pesantren: kiai, santri, kegiatan di masjid, dan kegiatan di pondok; termasuk para ustaz-ustazah dan dewan pengurus pesantren.

D. Analisis Problematika Penerapan Pendidikan Islam Berbasis Moderatisme di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember dan *Problem-Solving*-nya

Analisis problematika penerapan pendidikan Islam berbasis moderatisme di PP. Nurul Islam Jember yang akan diketengahkan pada bahasan ini ialah mengenai analisis problematika penerapan sebagaimana telah dipaparkan pada Bab IV serta tawaran solusinya.

Jika dilakukan analisis lebih dalam maka secara garis besar akan ditemukan faktor pendukung yang menunjang optimalisasi proses penerapan pendidikan moderatisme dan juga faktor penghambat yang menjadi problem tersendiri selama proses pendidikan tersebut berlangsung.

Faktor pendukung penerapan kurikulum pendidikan Islam berbasis moderatisme di PP. Nurul Islam Jember meliputi: *pertama*, ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang seperti buku, kitab, dan perpustakaan. *Kedua*, pembelajaran integratif yang melibatkan semua elemen yang ada di PP. Nurul Islam Jember. *Ketiga*, kerja sama dengan lembaga-lembaga non-

Islam dan aliran keagamaan, sebagai bentuk pengenalan keragaman keberagaman kepada santri. Dalam hemat peneliti, faktor-faktor pendukung tersebut dapat dikatakan cukup membantu penerapan kurikulum pendidikan Islam berbasis moderatisme di pesantren ini, tetapi dapat menjadi problem serius yang bisa menghambat proses penerapan kurikulum berbasis moderatisme, jika sumber daya manusianya kurang bisa memaksimalkan sarana prasarana yang ada secara optimal.

Sedangkan kendala penerapannya meliputi: *pertama*, proses pengenalan sistem pendidikan moderat kepada santri baru memakan waktu yang relatif lama; *Kedua*, masih terdapat keterbatasan komunikasi dalam kerja sama dengan aliran-aliran yang berbeda pemahaman dan dengan lembaga-lembaga lain yang berbeda agama; dan *Ketiga*, kondisi geografis pesantren yang berada di tengah-tengah empat lembaga keagamaan Islam nonformal dan tiga belas lembaga pendidikan formal dalam radius 100 m hingga 6 km.

Tawaran solusi peneliti adalah sebagai berikut. Kendala *pertama* bukanlah kendala yang substansial, melainkan bersifat teknis. Artinya, masalah ini hanya terkait pada cara penyampaiannya. Problem ini bisa diatasi dengan mengelompokkan santri berdasarkan latar belakang pendidikannya, bukan hanya pada asal daerah santri baru tersebut.

Hal ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa tidak semua santri baru memiliki daya paham yang sama. Ketika pengelompokan tersebut berhasil dilakukan maka materi pengenalan moderatisme sebagai basis pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren ini bisa disesuaikan dengan

kemampuan dan daya paham siswa, sehingga sejalan dengan hasil pengelompokan tersebut. Solusi ini sedikit-banyak akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengenalan basis pembelajaran yang memang baru ini.

Kendala *kedua* timbul sebagai akibat dari kurangnya pemahaman. Aliran dan lembaga-lembaga yang berbeda haluan dengan pesantren ini, mungkin, masih kurang yakin dengan kerja sama yang dibangun. Persepsi ini muncul sebagai efek samping dari kurangnya intensitas pertemuan dalam forum terbuka antara kedua belah pihak (dan kurangnya iktikad bersama yang senada dari aliran dan agama lainnya).

Solusi yang bisa ditawarkan, antara lain, ialah rekonseptualisasi kesepakatan kerja sama tersebut dalam bentuk interaktif. Artinya, inisiatif, maksud dan tujuan kerja sama harus lahir dari kedua belah pihak, bukan hanya dari satu pihak. Jika kedua belah pihak telah bersama-sama mempunyai iktikad untuk bekerja sama dalam membentuk generasi moderat, misalnya, bukan mustahil komunikasi di antara keduanya akan lebih lancar.

Kendala *ketiga* sebenarnya merupakan kendala yang lahir dari kekhawatiran berlebihan terhadap kelompok lain. Kekhawatiran ini menjebak, karena, secara tidak langsung PP. Nurul Islam Jember merasa terancam dengan keberadaan lembaga-lembaga lain di sekitarnya. Kekhawatiran ini masih dalam batas wajar, karena yang menjadi pertimbangan ialah bagaimana para santri PP. Nurul Islam Jember mampu bersikap moderat. Dan dalam waktu yang sama, pesantren ini telah menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga yang berbeda haluan.

Di samping itu, dalam hemat peneliti, hal ini bukan sekedar kendala geografis tetapi juga sosiologis. Merupakan kendala geografis, karena PP. Nurul Islam Jember berada tidak jauh dari lembaga-lembaga lain yang berbeda aliran dan bahkan cenderung ‘menyerang’ secara intelektual. Merupakan kendala sosiologis, karena para santri PP. Nurul Islam Jember juga berinteraksi, langsung atau tidak langsung, dengan murid-murid dari lembaga-lembaga lain tersebut. Letak kendalanya bukan pada betapa besar pengaruh lingkungan tersebut dalam membentuk watak dan pola pikir, melainkan masih terdapat beberapa santri PP. Nurul Islam Jember yang belum memiliki basis ASWAJA yang kuat dalam memahami dan mengamalkan sikap moderat secara proporsional.

Keadaan geografis yang seolah terhimpit oleh banyak lembaga pendidikan yang beragam terkesan menyulitkan PP. Nurul Islam Jember dalam menerapkan pendidikan Islam berbasis moderatisme. Tetapi, dalam hemat peneliti, mengatasi kendala ketiga ini tidak sesulit yang dibayangkan. Karena kendala ini dapat dibalik menjadi tantangan yang menggoda pesantren ini untuk mengakrabi, mengenali, dan menjadikannya mitra. Meluaskan upaya menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga non-Islam dan kerja sama dengan keempat lembaga keagamaan yang berbeda aliran merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kendala ketiga ini, di samping tetap memberikan pembekalan wawasan yang moderat tentang aliran-aliran tersebut kepada para santri agar tetap mengambil sikap yang bijak ketika berhadapan langsung.

Agar lebih mudah dalam memahami struktur kajian dalam penelitian ini, berikut ini adalah skema hasil analisa data yang telah dikumpulkan:

Skema 5.1 Hasil Penelitian tentang Pendidikan Islam Berbasis Moderatisme di PP. Nurul Islam Jember

